



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratikno

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Indeks Modal Manusia	0,56
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK)	Memuaskan

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	10.440.328.000,-
Program Dukungan Manajemen	149.675.562.000,-
Jumlah Anggaran Efektif T.A. 2025	160.115.890.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89
	Indeks Perlindungan Anak	70,19
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,430
	Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	69
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Nilai reformasi birokrasi tematik pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	1.694.271.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	200.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	1.894.271.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Reviani
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyningrum

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Perempuan,

Nia Reviani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE)	4; 3; 5
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	3,59
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	17,35
	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	85
	Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	28.777-30.085
	Persentase anggaran responsif gender	K/L: 5,20 ; Prov/Kab/Kota: 11,2
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	372.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	372.680.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
 Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan,
 dan Pemberdayaan Perempuan,



Nia Reviani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustikorini Indrijatiningrum
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan
Pembangunan Kependudukan,

Mustikorini Indrijatiningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	50
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,1
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,4
	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	35
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	373.396.000,-
Koordinasi	101.060.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	474.456.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Keluarga,

Mustikorini Indrijatiningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Reviani

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:

Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak,

Nia Reviani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	67,57
	Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,44
	Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Laki-laki: 25,37 Perempuan: 31,60
	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	2,41
	Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	373.396.000,-
Koordinasi	101.060.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	474.455.000,-

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jakarta, Mei 2025
Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak,



Nia Reviani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Radius Siregar
Jabatan : Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyningrum

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan
Penyandang Disabilitas,

Ricky Radius Siregar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	50
	Persentase lansia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka panjang	10
	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	10
	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	13,08
	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun keatas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	11,67
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	372.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	372.680.000,-

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jakarta, Mei 2025
 Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas,

Ricky Radius Siregar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Javan Herdamang Pajrin
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyningrum
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyningrum

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputy Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan
Kependudukan,

Javan Herdamang Pajrin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	78

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	100.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	100.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	200.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,

Javan Herdamang Pajrin



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Pratikno

Sukadiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	Menurun
	Angka Kematian Balita	15
	Prevalensi <i>Stunting</i>	18,8
	Usia Harapan Hidup	74,43
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	1.867.484.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	200.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	2.067.484.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Pratikno



Sukadiono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum
Jabatan : Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan,

Linda Restaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	74,43
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	36
	Persentase kab/kota dengan puskesmas PONED sesuai standar	20
	Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50
	Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	40
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	65
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	50
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	20
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	35
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia lansia	50
	Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	100
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	422.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	422.680.000,-

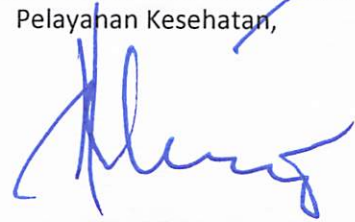
Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan,



Linda Restaningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nancy Dian Anggraeni
Jabatan : Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas dan
Ketahanan Kesehatan,

Nancy Dian Anggraeni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	menurun
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	329
	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC)	90
	Angka Keberhasilan pengobatan TBC (<i>TB Success Rate</i>)	90
	Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta	11
	Desa endemis <i>schistosomiasis</i>	18
	Insidensi HIV	0,09
	Kabupaten/Kota eliminasi Malaria	425
	Persentase Diabetes dalam pengendalian	15
	Presentase Hipertensi dalam Pengendalian	20
	Cakupan Imunisasi HPV	90
	Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	12,4
	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	397
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM	276
	Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	462
	Kab/kota sehat	182
	Jumlah kab/kota eliminasi Rabies	430
	Rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2,5
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	80
	(A2) RS yang mengimplementasikan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)	30
	(A2) Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	30
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	80
Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Memuaskan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah untuk Penurunan Prevalensi Stunting	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	422.680.000,-
Koordinasi	157.191.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	579.871.000,-


Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan
Ketahanan Kesehatan,



Nancy Dian Anggraeni



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	65
	Penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin	10
	Persentase obat yang aman dan bermutu	90
	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	65
	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	94
	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	17
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	67
	Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	19
	Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	270
	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	15
	Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	5
	Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	22
	Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	20
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	50
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	20
	Pengeluaran kesehatan total per kapita	2,2
	Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	5
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Memuaskan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	422.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	422.680.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Asisten Deputi
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan,

Sukadiono

Redemtus Alfredo Sani Fenat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelsi Natalia Marampa
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan
Pencegahan Stunting,

Jelsi Natalia Marampa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan gizi dan pencegahan stunting	Angka Kematian Ibu	122
	Angka Kematian Balita	15
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	18,8
	Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	8
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	10
	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	15
	Jumlah KLB keracunan pangan	250
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	422.253.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	422.253.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Asisten Deputi
 Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting,



Jelsi Natalia Marampa



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anitha
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Anitha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	78

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	52.330.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	147.670.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	200.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
 Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono



Anitha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ojat Darojat
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Pratikno

Ojat Darojat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32
	Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional a) literasi membaca b) numerasi	62,89 54,36
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	nilai reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pendidikan	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.851.729.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	200.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	2.051.729.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Pratikno



Ojat Darajat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darojat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darojat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dasar,

Jazziray Hartoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

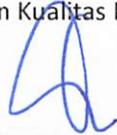
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Jumlah anak tidak sekolah usia 6–18 tahun	3.776.239
	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	31,14
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi	(a) 50,55; (b) 41,36
	<i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)	88,3
	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD	64,39
	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	16,56
	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	46.08
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pendidikan	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	430.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	430.360.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat

Asisten Deputi Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dasar,



Jazziray Hartoyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katiman
Jabatan : Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darojat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri,

Ojat Darojat

Katiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Ranking SDGs: (a) Top 300 (b) Top 600 (c) Top 1000	(a) 8; (b) 12; (c) 22
	Jumlah paten granted dari perguruan tinggi	17,5
	Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	1.256
	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	70,5
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden bidang Pendidikan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	430.360.000,-
Koordinasi	130.289.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	560.649.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Asisten Deputi
Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri,



Ojat Darajat



Katiman



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronica Enda Wulandari
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia Pendidikan,

Veronica Enda Wulandari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	54,93
	Indeks Pemetaan Guru	35,91
	Persentase Dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	43,7
	Persentase dosen berkualifikasi S3:	(a) 21,56 (b) 19,08 (c) 23,54
	a) Total	
	b) STEM	
	c) Non STEM	
	Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	51,29
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	1	
Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	80	
Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Memuaskan	
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pendidikan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	430.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	430.360.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Asisten Deputi
 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Pendidikan,



Ojat Darajat



Veronica Enda Wulandari



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Wijaya
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darojat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darojat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan Tinggi,

Maman Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	87,4
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94
	Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)	0,46
	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi	(a) 59,30; (b) 52,55
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pendidikan	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Efektif (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	430.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	430.360.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan Tinggi,



Ojat Darajat



Maman Wijaya



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Wahyugiono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darojat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darojat

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Pendidikan,

Puji Wahyugiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	78

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	49.980.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	150.020.000,-
Jumlah Anggaran	200.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Kepala Bagian Tata Usaha,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat



Puji Wahyugiono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsito
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,

Pratikno

Warsito

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	65,49
	Indeks Pembangunan Pemuda	65,16
	Nilai dimensi budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	63,24
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	80
	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Nilai reformasi birokrasi tematik kewirausahaan pemuda mendorong peningkatan investasi	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	1.836.451.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	200.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	2.036.451.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,



Pratikno



Warsito



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Syamsurizal
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,

Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan,

Ivan Syamsurizal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,39
	Nilai dimensi budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	63,24
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik kewirausahaan pemuda mendorong peningkatan investasi	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	423.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	423.360.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,

Warsito

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian
 Kebudayaan,

Ivan Syamsurizal



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Hendrarto
Jabatan : Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti,


Gatot Hendrarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penguatan Budi Pekerti	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	65,49
	Indeks Aktualisasi Pancasila	79,37
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,97
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Penguatan Budi Pekerti	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penguatan Budi Pekerti	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penguatan Budi Pekerti	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Penguatan Budi Pekerti	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik kewirausahaan pemuda mendorong peningkatan investasi	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	423.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	423.360.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


 Warsito

Jakarta, Mei 2025
 Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti,


 Gatot Hendrarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sunandar
Jabatan : Asisten Deputi Bina Keagamaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,

Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Bina Keagamaan,

Asep Sunandar

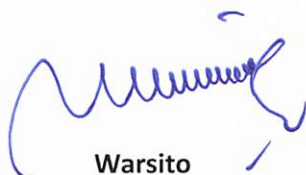
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Bina Keagamaan
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Bina Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77
	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) (a) layanan haji dalam negeri (b) layanan haji luar negeri	(a) 91,00; (b) 88,25
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Bina Keagamaan	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Bina Keagamaan	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Bina Keagamaan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Bina Keagamaan	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik kewirausahaan pemuda mendorong peningkatan investasi	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	423.360.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	423.360.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,



Warsito

Jakarta, Mei 2025
 Asisten Deputi Bina Keagamaan,



Asep Sunandar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saufi
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan
Peningkatan Prestasi Bangsa,


Ahmad Saufi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA


Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Indeks Pembangunan Pemuda	65,16
	Peringkat pada Sea Games	3
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,36 - 11,45
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik kewirausahaan pemuda mendorong peningkatan investasi	2


Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	423.360.000,-
Koordinasi	143.011.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	566.371.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


 Warsito

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan
 Peningkatan Prestasi Bangsa,


 Ahmad Saufi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	0,137
	Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1,2
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Bidang Pengurangan Risiko Bencana	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	1.653.192.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	200.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	1.853.192.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan,



Pratikno

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Efriana
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Penanganan Bencana,

Merry Efriana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Bencana
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penanganan Bencana	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	0,137
	Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar	100
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Penanganan Bencana	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Bencana	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Bencana	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Penanganan Bencana	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pengurangan risiko bencana	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	420.092.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	420.092.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

Asisten Deputi
 Penanganan Bencana,

Merry Efriana



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Notohamijoyo
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Andre Notohamijoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pengurangan Risiko Bencana	Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1,2
	Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang	67
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pengurangan Risiko Bencana	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pengurangan Risiko Bencana	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pengurangan Risiko Bencana	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Aksi Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Bidang Pengurangan Risiko Bencana	2

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	377.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	377.680.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Asisten Deputi
 Pengurangan Risiko Bencana,



Lilik Kurniawan



Andre Notohamijoyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monalisa Herawati Rumayar
Jabatan : Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

Monalisa Herawati Rumayar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rasio daerah pasca bencana massif yang ditangani	100
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pengurangan risiko bencana	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	377.680.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	377.680.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

Asisten Deputi
 Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

Monalisa Herawati Rumayar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asril
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Penanganan Pascakonflik Sosial,

Asril

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	19
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	Jumlah aksi mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik percepatan prioritas aktual presiden bidang pengurangan risiko bencana	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	377.680.000,-
Koordinasi	100.060.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	477.740.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan

Asisten Deputi
 Penanganan Pascakonflik Sosial,



Asril



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulansari Handayani
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Penanggulangan Bencana dan
Konflik Sosial,

Wulansari Handayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	78

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	160.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	200.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik
Sosial,



Wulansari Handayani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Darmansyah Edisaputra
Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Hukum dan Tata Kelola
Pemerintahan,

Pratikno

Aris Darmansyah Edisaputra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	1
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko PMK	Nilai Reformasi Birokrasi General	83
	Indeks BerAKHLAK	75

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	125.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	125.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Staf Ahli
Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan,



Pratikno



Aris Darmansyah Edisaputra



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiono Subambang
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Pembangunan Berkelanjutan,

Pratikno

Budiono Subambang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian Bidang Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Berkelanjutan	1
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	33
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	12,5

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pembangunan Berkelanjutan	125.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	125.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,



Pratikno

Staf Ahli
Bidang Pembangunan Berkelanjutan,



Budiono Subambang



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Eka Setiawan
Jabatan : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Manusia
Berkualitas,

Pratikno

Iwan Eka Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	1
Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan prasekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	36,61

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	125.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	125.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas,



Pratikno



Iwan Eka Setiawan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sorni Paskah Daeli
Jabatan : Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya,

Pratikno

Sorni Paskah Daeli

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Sosial, Ekologi, dan Budaya
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	1
Meningkatnya Ketangguhan Sosial dan Institusional Desa dalam Menghadapi Risiko Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	7000 desa/kelurahan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	125.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	125.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Staf Ahli
Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya,



Pratikno



Sorni Paskah Daeli



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

Imam Machdi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Nilai Reformasi Birokrasi	90,5
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian	Memuaskan

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	148.675.562.000,-
Koordinasi Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.537.201.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	150.212.763.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno



Imam Machdi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Budi Handayani
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja
Sama, dan Sumber Daya Manusia,

Nur Budi Handayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan Sumber Daya Manusia	Indeks Perencanaan Pembangunan	99,5
	Nilai SAKIP	80
	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri	90
	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri	90
	Indeks Profesionalisme ASN (skala 100)	78
	Indeks Sistem Merit (0-410)	250-324 (Baik)
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan MKKS SDM	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.310.202.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Internal	934.767.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000.000,-
Kebijakan Bidang Sosial	1.599.711.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	4.844.680.000,-

Jakarta, Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama,
dan Sumber Daya Manusia,



Nur Budi Handayani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Setia Ningrum
Jabatan : Kepala Bagian Manajemen Kinerja

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nur Budi Handayani
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan
Sumber Daya Manusia,


Nur Budi Handayani

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Manajemen Kinerja,


Aria Setia Ningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama,
dan Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Manajemen Kinerja Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen manajemen kinerja Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta,

Mei 2025

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan
Sumber Daya Manusia,



Nur Budi Handayani

Kepala Bagian Manajemen Kinerja,



Aria Setia Ningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarip Hidayat
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepaka:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana,

Syarip Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	83
	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100
	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi	4,5
	Indeks Kualitas Kebijakan	80
	Indeks Reformasi Hukum	98,3
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap Dukungan Penyelenggaraan Layanan Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Memuaskan

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	600.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	600.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Prasetyo
Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,

Budi Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan komunikasi, serta pengelolaan persidangan dan perpustakaan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96
	Survei Kepuasan Masyarakat (skala 100)	90,5
	Indeks Pelayanan Publik (skala 5)	4,65
	Tingkat TL Pengaduan LAPOR (skala 5)	4,2
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Komunikasi dan Persidangan	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.650.000.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	2.650.000.000,-

Jakarta, Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,



Imam Machdi



Budi Prasetyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Budi Prasetyo
Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,

Budi Prasetyo

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen persidangan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,



Budi Prasetyo

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiandi Susantyo
Jabatan : Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan
Bahan Persidangan,

Dwiandi Susantyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen penyusunan bahan persidangan	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama

Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan,



Dwiandi Susantyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avandra Ardy Nugraha
Jabatan : Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Risalah dan
Dokumentasi Persidangan,

Avandra Ardy Nugraha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen risalah persidangan	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama

Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan,



Avandra Ardy Nugraha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Gumilar Triyanto
Jabatan : Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Digitalisasi dan
Pengelolaan Informasi,

Agung Gumilar Triyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas layanan digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,6
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur (SPBE)	3
	Indeks Pembangunan Statistik	3
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	798.800.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	798.800.000,-

Jakarta, Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Digitalisasi dan
Pengelolaan Informasi,



Agung Gumilar Triyanto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Umum
dan Keuangan,

Indah Suwarni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Keuangan	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94
	Indeks Pengelolaan Aset (skala 4)	3,7
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (skala 100)	87
	Tingkat Digitalisasi Arsip (skala 100)	85
	Indeks Opini BPK	WTP
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Umum dan Keuangan	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	138.417.677.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.211.907.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	507.452.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	140.137.036.000,-

Jakarta, Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Umum
dan Keuangan,



Indah Suwarni



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Indah Suwarni

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga,

Fiki Ikrom Ibrahim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen Rumah Tangga Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Kepala Biro Umum dan
Keuangan,



Indah Suwarni

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Rumah Tangga,



Fiki Ikrom Ibrahim



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Dra. Indah Suwarni

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Pimpinan,

Reny Putri Septiawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Penatausahaan Pimpinan dan Keprotokolan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen Keprotokolan dan Ketatausahaan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Indah Suwarni

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan,



Reny Putri Septiawati



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Aning Pradita
Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Rumah Tangga,


Fiki Ikrom Ibrahim

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Urusan Dalam dan
Pengadaan,


Ananda Aning Pradita

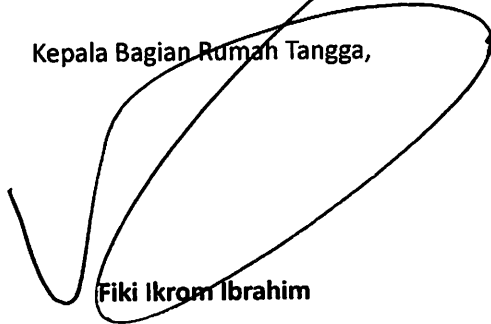
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen urusan dalam dan pengadaan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

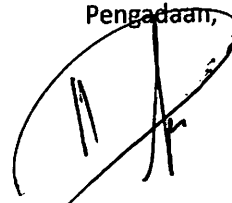
Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Rumah Tangga,



Fiki Ikrom Ibrahim

Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan,



Ananda Aning Pradita



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzuludin
Jabatan : Kepala Subbagian Protokol

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,



Reny Putri Septiawati

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Protokol,



Nuzuludin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen bidang keprotokolan	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,


Reny Putri Septiawati

Kepala Subbagian Protokol,


Nuzuludin



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Vanda Viyanti
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,


Reny Putri Septiawati

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri Koordinator,


Annisa Vanda Viyanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Tata Usaha Menteri PMK	Persentase penyelesaian Draft Laporan Tata Usaha Menteri Koordinator	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draft Pedoman (NSPK) Bidang Ketatausahaan Menteri Koordinator	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draft Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan Menteri Koordinator	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,


Reny Putri Septiawati

Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri Koordinator,


Annisa Vanda Viyanti



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Putriani
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,


Reny Putri Septiawati

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,


Rahma Putriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator PMK dan Staf Ahli	Persentase penyelesaian Draft Laporan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draft Pedoman (NSPK) Bidang Ketatausahaan Sekretaris Menteri Koordinator dan Staf Ahli	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draft Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan Sekretaris Menteri Koordinator dan Staf Ahli	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Mei 2025

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,


Reny Putri Septiawati

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,


Rahma Putriani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Marvin
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Inspektur,

Henry Marvin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan internal	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,850
	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan	90%
	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,25)
	Survey Penilaian Integritas	82,5
	Indeks Manajemen Risiko	3,850
	Jumlah Unit yang Memperoleh Predikat WBK	1

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	688.480.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	688.480.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Inspektur,



Henry Marvin



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda Paramitha Kusuma Dewi.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Henry Marvin
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2025

PIHAK KEDUA:
Inspektur,

Henry Marvin

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,

Melinda Paramitha Kusuma Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas layanan Pengawasan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Persentase penyelesaian draf dokumen administrasi pengawasan internal	90 - 100% draft dokumen selesai


Jakarta, Mei 2025

Inspektur,



Henry Marvin

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,



Melinda Paramitha Kusuma Dewi